

**LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGOTA DAN KELOMPOK KERJA BP3OKP
PROVINSI PAPUA SELATAN BULAN JUNI
NOMOR: LAP-06/BPP/PPS/VII/2025**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGOTA DAN KELOMPOK KERJA BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna memastikan percepatan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua. BP3OKP hadir untuk memperkuat tata kelola Dana Otsus serta memastikan agar pelaksanaannya tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil masyarakat adat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan menjalankan fungsi strategis sebagai fasilitator, penghubung, dan pengarah bagi program-program pembangunan daerah berbasis Otonomi Khusus. Melalui keterlibatan aktif para anggota dan kelompok kerja (Pokja), BP3OKP Papua Selatan terus mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan Orang Asli Papua (OAP), baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur dasar.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi, akuntabilitas, dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Juni 2025 oleh para anggota dan kelompok kerja BP3OKP Provinsi Papua Selatan. Laporan ini mencakup rincian kegiatan strategis, hasil yang dicapai, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut guna mendukung terwujudnya Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif. Serta Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah otonom khusus berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat adat Papua.

II. TUJUAN

- Mendokumentasikan seluruh aktivitas Pokja dan anggota BP3OKP secara sistematis.
- Mengevaluasi capaian program kerja bulanan.
- Menjadi acuan untuk perencanaan kegiatan bulan berikutnya.

III. RINCIAN KEGIATAN

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Provinsi Papua Selatan, para anggota dan kelompok kerja (Pokja) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sepanjang bulan Juni 2025. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan komitmen BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan yang berbasis kearifan lokal, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat adat, dan berlandaskan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Kegiatan yang dilakukan mencakup pelibatan dalam agenda nasional, koordinasi lintas lembaga, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, serta audiensi dengan kementerian/lembaga strategis. Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Dana Otonomi Khusus secara lebih efektif dan menyeluruh, serta memastikan keterlibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap tahapan pembangunan.

Berikut ini adalah rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala BP3OKP dan anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Selatan selama bulan Juni 2025, beserta tujuan, lokasi, dan hasil/output yang dicapai.

1. KEPALA BP3OKP

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memiliki mandat strategis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan yang didanai melalui Dana Otsus benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi koordinasi, harmonisasi, evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan Otsus Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan, Anggota BP3OKP terus melakukan keterlibatan aktif dalam berbagai agenda nasional dan daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk kehadiran kelembagaan, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk mendorong kolaborasi lintas kementerian/lembaga, mengawal hak masyarakat adat, serta memperkuat peran BP3OKP dalam mendampingi pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejumlah kegiatan penting yang diikuti selama periode ini mencakup:

- Kehadiran dalam pelantikan DPR Afirmasi Provinsi Papua Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan representasi politik Orang Asli Papua;
- Pembahasan progress kinerja BPP Triwulan I Tahun 2025 sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan perencanaan kerja;
- Keterlibatan dalam Rapat Koordinasi Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Dana Otsus bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, guna mendorong transparansi dan sinkronisasi data dalam pengelolaan Dana Otsus;
- Audiensi strategis bersama Menteri Hukum dan HAM, yang menghasilkan diskusi mendalam terkait pendekatan kultural dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pentingnya penghargaan terhadap hak ulayat tanah adat, penegakan hukum atas pelanggaran HAM, serta perlindungan hak masyarakat adat secara menyeluruh;
- Pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM, yang membuka peluang kerjasama dalam program Koperasi Merah Putih, dengan melibatkan perguruan tinggi lokal dan mendukung penguatan ekonomi kreatif masyarakat Papua Selatan;
- Audiensi dengan Direktur Sistem Perbendaharaan Keuangan, yang menegaskan pentingnya penguatan peran BP3OKP dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, pelaporan keterlibatan OAP, perbaikan sistem reimburse, serta wacana pengelolaan DIPA secara mandiri oleh BP3OKP ke depan.

Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, BP3OKP Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus memainkan perannya secara aktif dan transformatif dalam mendorong percepatan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Tanah Papua, dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan.

B. Rincian dan Hasil Kegiatan

1) Menghadiri undangan pelantikan DPR Afirmasi Provinsi Papua Selatan.

Output Kegiatan:

Terjalin komunikasi awal dan penguatan kolaborasi untuk program pembangunan berbasis masyarakat adat.

2) Pembahasan Progress Kinerja Badan Pengarah Papua (BPP)TW 1 2025.

Output Kegiatan:

Rekomendasi perbaikan tata kelola, pelaporan, dan pelibatan Pokja secara aktif.

3) Menghadiri undangan Rapat Koordinasi Introperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Dana Otsus bersama Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Output Kegiatan:

- a) Kesepahaman terkait integrasi sistem pelaporan Dana Otsus
- b) Komitmen peningkatan transparansi dan monitoring Dana Otsus.

4) Audiensi BP3OKP bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia(HAM) RI.

Output Kegiatan:

- a) Diskusi berkaitan dengan PSN di Provinsi Papua Selatan pendekatan untuk PSN harus dilakukan secara Cultural, Teknokratis, dan Agama untuk menghindari Konflik dengan Masyarakat.
- b) Harus ada Kompensasi Ganti Rugi untuk Hak-hak Ulayat Tanah Adat sesuai Marga dari Masyarakat Adat agar tidak merasa dirugikan.
- c) Pelanggaran HAM harus ditindak tegas sesuai Hukum yang berlaku Hak-hak Masyarakat Adat harus dihargai dengan baik.

5) Audiensi BP3OKP bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Output Kegiatan:

- a) Diharapkan Peran penting dan strategis dari BP3OPK untuk support Program Presiden Koperasi Merah Putih yang akan didirikan disetiap Kampung.
- b) BP3OKP diharapkan bisa bekerjasama dan berkolaborasi dengan Menteri Koperasi untuk Sosialisasi Peran dan pentingnya didirikan Koperasi Merah Putih bagi Masyarakat Papua Selatan Biaya sosialisasi akan dibebankan kepada Menteri Koperasi dan bekerjasama dengan Stakeholder di Daerah.
- c) Melibatkan Mahasiswa-Mahasiswi dan Dosen Musamus untuk mensosialisasi Koperasi Merah Putih di seluruh Wilayah Provinsi Papua Selatan.
- d) Meningkatkan ekonomi Kreatis di seluruh wilayah provinsi Papua Selatan.
- e) Mengundang Bapak Menteri Koperasi untuk Acara Panen dan ekspor perdana Karet yang diproduksi oleh Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan.

6) Audiensi BP3OKP bersama dengan Direktur Sistem Perbendaharaan Keuangan.

Output Kegiatan:

- a) Peran penting BP3OKP untuk mengawasi dan evaluasi tentang pengadaan Barang dan Jasa.
- b) Setiap bulan BP3OKP harus mendapatkan Laporan tentang keterlibatan OAP didalam Barang dan Jasa.
- c) Sistem Reimburse harus diperbaiki, dokumen lengkap 2 minggu harus dibayarkan.
- d) Setiap Tugas ke Daerah PPK-KPPN harus menyediakan Dana Operasional untuk BP3OKP dan Pokja.
- e) Diharapkan ke depan BP3OKP akan mengelolah DIPA sendiri.
- f) Sistem Rekrutmen Pokja agar segera di lengkapi.
- g) Menyediakan waktu Audiensi dengan Bapak Wapres.

C. Kesimpulan

Seluruh kegiatan yang dihadiri oleh Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada Triwulan I Tahun 2025 mencerminkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Otsus, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Papua secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga telah dibangun dengan arah kebijakan yang mendukung Papua Selatan sebagai wilayah yang cerdas, sehat, dan produktif.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Menghadiri Undangan Pelantikan DPR Afirmasi Provinsi Papua Selatan



Dokumentasi Pembahasan Progress Kinerja Badan Pengarah Papua (BPP)



Dokumentasi menghadiri undangan Rapat Koordinasi Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Dana Otsus bersama Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan TW1 2025



Dokumentasi Audiensi BP3OKP bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI



Dokumentasi Audiensi BP3OKP bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil



Dokumentasi Audiensi BP3OKP bersama dengan Direktur Sistem Perbendaharaan Keuangan Output Kegiatan Menengah

2. KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS

A. Latar Belakang

Dana Otonomi Khusus (Otsus) disalurkan sebagai upaya strategis untuk mendukung pembangunan di Provinsi Papua, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum, dan menghormati Hak Asasi Manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Setelah 20 tahun berjalan, Pemerintah Pusat melanjutkan penyaluran Dana Otsus dengan memperkuat payung hukumnya melalui penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2021, yang mengubah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu perubahan penting yang diusung adalah penguatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Otsus, melalui pembentukan badan khusus, yaitu Badan Pengarah Papua.

Badan Pengarah Papua (BPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pembentukan BPP bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh Dana Otsus Papua. Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pelaksanaan Otsus Papua. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dengan fokus pada penggunaan Dana Otsus secara efektif dan efisien, guna mewujudkan visi pembangunan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat yaitu kompleksitas koordinasi antara lembaga dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman diantara mereka dalam efektivitas komunikasi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pembentukan Kelompok Kerja yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPP, dengan fokus pada memperkuat koordinasi, memastikan partisipasi aktif masyarakat Papua, serta menjembatani pemahaman dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Otsus. Dalam arahan presiden pada 11 Maret 2020 dikatakan bahwa “Perlunya semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, dan desain baru agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Selanjutnya dalam 5 kebijakan percepatan Pembangunan Papua yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yaitu penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan tata Kelola, penguatan partisipasi & sinergi pelaku dan FOKUS pada kemanfaatan bagi OAP.

Berdasarkan misi RIPP 2022-2024 yaitu Memberikan pelayanan Pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju “Papua Cerdas”, dengan sasaran Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk Meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing, serta dimensi pembangunan yang terdiri atas Fasilitas pendidikan yang berkualitas, Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif, Distribusi tenaga pendidik yang merata, dan Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem pendidikan secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh

lapisan masyarakat khususnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) OAP.

B. Maksud dan tujuan

1) Maksud

Rapat Kerja ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi strategis antara Pemerintah Daerah se-Papua Raya dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan dan optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua. Melalui rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, integrasi program, serta penguatan peran dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

2) Tujuan

Tujuan dari Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Se-Papua Raya, adalah :

- Menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan daerah dengan program strategis BP3OKP dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan penggunaan Dana Otsus di masing-masing daerah di Papua Raya.
- Merumuskan strategi percepatan pembangunan yang berbasis potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan prinsip keadilan sosial.
- Mengidentifikasi kendala, tantangan, serta merancang solusi bersama untuk efektivitas pelaksanaan Otsus sebagai rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan presiden.
- Meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen antar pemerintah daerah, BP3OKP, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua.
- Menyusun rencana tindak lanjut (action plan) bersama untuk implementasi program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat adat.

C. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- 5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- 6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.

- 7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Se-Papua Raya telah dilaksanakan pada Hari Selasa, 15 April 2025 yang berlokasi pada Propinsi Papua Tengah. Ruang lingkup rapat kerja mencakup:

- 1) **Sinkronisasi Program dan Kegiatan**
Menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program strategis BP3OKP dalam kerangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus.
- 2) **Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus**
Pembahasan capaian, tantangan, dan kendala implementasi program Otsus di seluruh wilayah Papua Raya.
- 3) **Perumusan Strategi Percepatan Pembangunan**
Penyusunan strategi berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat Papua untuk mempercepat kesejahteraan.
- 4) **Penguatan Tata Kelola Dana Otsus**
Peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan Dana Otsus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 5) **Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah**
Diskusi tentang penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan Otsus.
- 6) **Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Lokal**
Perumusan program berbasis pemberdayaan masyarakat asli Papua, penghormatan hak-hak adat, dan pelibatan komunitas lokal dalam pembangunan.
- 7) **Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**
Penetapan komitmen bersama dan langkah-langkah konkret sebagai hasil akhir rapat kerja untuk implementasi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi.

E. Ringkasan Kegiatan

1) Pembahasan Rapergub SPM

Hasil Kegiatan

- a) Draft Final Rapergub tentang Penerapan SPM.
- b) Penyelarasan tindaklanjut SPM masing-masing OPD Provinsi Papua Selatan, khususnya bidang Pendidikan pada SPM Pendidikan khusus.
- c) Pembahasan data dan indikator terkait kesesuaian dengan RAPP dan RIPP

2) Pembahasan Rapergub SPM dan Pendampingan Teknis

Hasil Kegiatan

- a) Pendampingan teknis oleh tim skala dalam penyelarasan data dan indikator SPM pada masing-masing OPD.
- b) Penyelesaian Format Renaksi SPM pada semua OPD Provinsi Papua Selatan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



3. KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen kebijakan nasional untuk menjamin hak warga negara terhadap pelayanan dasar yang bermutu. Dalam konteks daerah otonomi baru seperti Provinsi Papua Selatan, implementasi SPM menjadi pilar utama dalam pembangunan sosial dasar yang responsif dan terarah.

Sejalan dengan amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Penerapan SPM dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Sebagai bagian dari peran koordinatif dan fasilitatif, BP3OKP Papua Selatan melalui Pokja Papua Sehat turut serta dalam rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Renaksi SPM Provinsi Papua Selatan pada tanggal 17–20 Juni 2025 di Merauke.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan peran aktif Pokja Papua Sehat dalam kegiatan pembahasan teknis dan konsolidasi lintas sektor terkait Renaksi SPM Provinsi Papua Selatan.

B. Tujuan

- Menyajikan catatan kegiatan Pokja dalam proses penyusunan Renaksi SPM.
- Mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi terkait pengintegrasian SPM ke dalam perencanaan daerah.
- Memberikan masukan strategis untuk penguatan koordinasi lintas OPD dalam pelaksanaan SPM.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan mencakup partisipasi aktif dalam:

- Konsolidasi penyusunan format Renaksi SPM bidang Kesehatan, Pendidikan, Trantibum, PUPR, dan Sosial.
- Pendampingan penyusunan pelaporan SPM ke dalam e-SPM.
- Penyusunan masukan Pokja terhadap indikator dan strategi penerapan SPM bidang kesehatan.
- Konsolidasi akhir bersama TAPD dan OPD teknis.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan
17 Juni 2025	Pembukaan, diskusi teknis Tim SPM Provinsi dan SKALA, serta pembahasan bidang Kesehatan, Pendidikan, Trantibum.	1) OPD teknis Provinsi Papua Selatan. 2) BP3OKP Papua Selatan (Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua Cerdas.
18 Juni 2025	Penyusunan format Renaksi bidang PUPR dan Sosial	3) Tim SKALA. 4) TAPD Provinsi Papua Selatan.
19 Juni 2025	Presentasi kepada TAPD, konsolidasi finalisasi dokumen, dan penginputan ke e-SPM.	
20 Juni 2025	Penuntasan penginputan dan	

	penutupan kegiatan.	
--	---------------------	--

E. Hasil Kegiatan

- 1) Draft akhir Pergub Renaksi SPM 2025–2029 tersusun untuk lima urusan layanan dasar.
- 2) Dokumen Renaksi disusun dengan matriks logis indikator, program, dan target capaian.
- 3) Permasalahan Penerapan SPM Teridentifikasi:
 - ❖ Pendidikan
 - Kendala pengumpulan data mutu.
 - Keterbatasan akses dan komunikasi Lembaga.
 - Keterlambatan data operator sekolah.
 - Ketidapahaman metode perhitungan kebutuhan.
 - Perlu dimasukkan ke dalam RAPP
 - ❖ Kesehatan
 - Kapasitas SDM kesehatan belum memadai.
 - Kesulitan data OAP dan non-OAP
 - Fokus kegiatan masih pada tanggap darurat
 - ❖ Pekerjaan Umum
 - Anggaran terbatas.
 - Sulit menetapkan penerima layanan
 - Minim tenaga teknis dan fasilitas.
 - Data belum by name by address
 - ❖ Perumahan Rakyat
 - Belum maksimalnya pengumpulan data.
 - Permasalahan legalitas tanah.
 - Keterbatasan SK Kawasan Kumuh
 - ❖ Trantibumlinmas.
 - Kurangnya SDM, pemahaman indikator
 - Kekurangan personel Satpol PP
 - Kurang sarana dan prasarana
 - ❖ Sosial
 - Minimnya panti sosial dan tenaga profesional
 - Belum optimalnya data PMKS
 - Layanan belum memenuhi standar kualitas
- 4) Input awal laporan capaian 2025 berhasil diunggah ke e-SPM.
- 5) Kesepahaman antar-OPD dan SKALA dalam penguatan strategi integrasi SPM ke dalam Dokumen Rencana Kerja Daerah (DOKREND A).
- 6) Dalam konteks daerah otonomi khusus seperti Papua Selatan, RKPD juga diharapkan memuat:
 - ❖ Integrasi dengan program Dana Otsus dan DAK Afirmasi.
 - ❖ Komitmen terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - ❖ Prioritas pengembangan kapasitas SDM OAP.
 - ❖ Penyelarasan dengan Rencana Aksi dalam Percepatan Pembangunan

F. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Finalisasi legal drafting Pergub Renaksi SPM oleh Biro Hukum dan Bappeda.
- 2) Fasilitasi internalisasi Pergub ke RPJMD dan Renja OPD.

- 3) Penguatan koordinasi lintas OPD untuk verifikasi data pembilang dan penyebut SPM.
- 4) Rencana pendampingan lanjutan ke kabupaten/kota oleh BP3OKP.
- 5) Rekomendasi

G. Rekomendasi

- 1) Setiap OPD segera menyusun rencana kerja sektoral berbasis indikator SPM.
- 2) BP3OKP diharapkan dapat melakukan pendampingan teknis SPM per bidang.
- 3) Provinsi dan Kabupaten/Kota didorong untuk menetapkan Tim SPM Daerah.
- 4) SKALA melanjutkan pendampingan integrasi DOKRENDA dan penganggaran

H. Kesimpulan

Kegiatan pembahasan Pergub Renaksi SPM ini menjadi tonggak penting dalam penataan layanan dasar di Papua Selatan. Partisipasi Pokja Papua Sehat mencerminkan komitmen untuk mendorong tata kelola yang berbasis standar, partisipatif, dan akuntabel demi pelayanan publik yang merata dan bermutu.

DOKUMENTASI KEGIATAN



4. KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF

A. Latar Belakang

Dana Otonomi Khusus (Otsus) disalurkan sebagai langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Setelah berjalan selama dua dekade, Pemerintah Pusat memperkuat dasar hukum pelaksanaan Otsus melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Salah satu pembaruan penting dalam undang-undang tersebut adalah pembentukan Badan Pengarah Papua (BPP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Otsus. BPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Badan ini memiliki tugas utama untuk melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan Otsus, guna memastikan pemanfaatan dana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam upaya mendukung visi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif, BPP mendorong program-program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Salah satu inisiatif tersebut dijalankan oleh Kelompok Kerja Papua Produktif (Pokja PP), yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan produksi koker bibit sayuran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan, serta membekali Orang Asli Papua dengan keterampilan dalam memproduksi media tanam sayuran yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.

B. Tujuan

- 1) Memberdayakan Orang Asli Papua dalam kegiatan pertanian produktif.
- 2) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pembuatan media tanam berupa koker bibit.
- 3) Mendorong terciptanya kemandirian pangan berbasis komunitas lokal.
- 4) Memanfaatkan bahan lokal dan limbah organik sebagai media tanam.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- 1) Tanggal : 2 Juni 2025
- 2) Tempat : Alfasera 1 Muting
- 3) Peserta : 3Orang Asli Papua dan 1Pendatang (3 laki-laki, 1 Perempuan)

D. Metode Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Sosialisasi tentang manfaat koker bibit.
- 2) Pelatihan teknis pembuatan koker bibit menggunakan bahan lokal.
- 3) Praktik langsung pembuatan dan penyemaian bibit sayuran.
- 4) Diskusi kelompok dan evaluasi hasil kerja.

E. Proses Pembuatan Koker Bibit

1) Bahan yang digunakan:

- Daun pisang kering / pelepah sagu / kertas bekas
- Tanah humus
- Sekam bakar
- Pupuk organik (kompos lokal)
- Benih sayuran (sawi, tomat, cabe, bayam)

2) Langkah-langkah:

- Membentuk koker dari bahan pembungkus (daun pisang/kertas).
- Mengisi koker dengan campuran tanah, sekam, dan pupuk organik.
- Menanam bibit sayuran di dalam koker.
- Meletakkan koker dalam rak sederhana yang dibuat dari bambu.
- Menyiram setiap hari dan mengamati pertumbuhan bibit.

F. Hasil Kegiatan

- 1) Telah diproduksi sebanyak **2000 koker bibit sayuran**.
- 2) Bibit berhasil disemai dan tumbuh dalam waktu 2minggu.
- 3) Peserta menunjukkan antusiasme dan pemahaman yang baik terhadap proses.
- 4) Sebagian koker disiapkan untuk distribusi ke kampung lain sebagai model.

G. Dampak Positif

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam kegiatan pertanian.
- 2) Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar daerah.
- 3) Menumbuhkan semangat gotong royong dan inovasi lokal.
- 4) Potensi pengembangan menjadi usaha mikro berbasis rumah tangga.

H. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Pelatihan lanjutan untuk perawatan bibit dan pemindahan ke lahan terbuka.
- 2) Pengembangan demplot kecil sebagai contoh kebun rumah tangga.
- 3) Kolaborasi dengan dinas pertanian untuk dukungan benih dan alat.
- 4) Dokumentasi kegiatan untuk replikasi di distrik lain.

I. Kesimpulan

Program pembuatan koker bibit sayuran oleh Orang Asli Papua telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang menggembirakan. Ke depan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bagian dari gerakan kemandirian pangan berbasis komunitas dan menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok produktif lainnya di Papua.

DOKUMENTASI KEGIATAN



IV. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota dan kelompok kerja BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Juni 2025 menunjukkan progres positif dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, dan penguatan nilai-nilai lokal. Ke depan, konsolidasi internal dan sinergi dengan mitra eksternal akan terus diperkuat demi mempercepat pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Laporan Bulan Juni BP3OKP Provinsi Papua Selatan, dibuat guna menginventarisir aktivitas pelaksanaan tugas kerja sesuai dengan program kerja yang direncanakan yang merujuk pada Perpres No.24 tahun 2023, dengan tugas melaksanakan SHEK dan fungsi sesuai penjabaran tugas perbidang sesuai dengan Keputusan Ketua BPP No 1 Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program selanjutnya, untuk menyukseskan pencapaian visi, misi dan strategi OTSUS Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari yang diharapkan dan juga jauh dari sempurna. Demikian laporan kami ini dibuat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 10 Juli 2025

Anggota BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Joseph Yanawo Yolmen, S.Pd, M.SI, MRSC
NIP. 090920240117145257